

PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN UNTUK MENUNJANG KEDAULATAN PANGAN

Juarini

Faculty of Agriculture, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Email: juarini_ma@yahoo.com

Abstract

Food is a basic requirement once the essence of human life, and therefore the right to food becomes a very important part of human rights. Currently Indonesia is the world's largest rice importer. If we do not find ways to increase food production, then Indonesia as an independent nation does not have the authority to independently provide food for its citizens. The sustainability of agriculture in the food supply is highly dependent on agriculture HR. But the vast majority of agricultural HR Indonesia is still low, many farmers are elderly and low capacity in the entrepreneurial aspect. If the condition is left to the desire to achieve food sovereignty is certainly far from expectations. The purpose of the study are: (a) determine the condition of food sovereignty in Indonesia (b) determine the condition of the current agricultural HR, and (c) HR management of agricultural to support food sovereignty. Appraisal method uses literature. The results showed that: (i) Indonesia needs to improve the availability of food, (ii), agricultural HR of Indonesia currently has a qualifying low competitiveness and (iii) required the HR management of agriculture with a focus on four main elements that cognition, psychomotor, affective, and intuition. With the agriculture human resource management in the four elements, is expected to drive the agricultural sector, which has implications for the realization of food sovereignt

Keywords: *Agriculture HR and Food Sovereignty*

PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia. Permintaan akan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Kebutuhan pangan penduduk Indonesia akan terus meningkat pada waktu mendatang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa dan akan bertambah sebesar 1,34 persen per tahun, maka dibutuhkan pangan dalam jumlah yang besar dan semakin bervariasi. Untuk kebutuhan beras saja, pada tahun 2009 diperlukan penambahan produksi beras sebanyak 1,8 juta ton atau setara dengan tiga juta ton gabah kering giling (Ayip, 2011). Apalagi masih tingginya tingkat konsumsi beras perkapita penduduk Indonesia sebesar 130,1 kg/tahun, merupakan permasalahan yang berat untuk ketahanan pangan, ditambah lagi adanya penurunan kemampuan produktivitas beras dalam negeri yang disebabkan karena penciptaan lahan, terjadinya *leveling off* dari peningkatan produktivitas padi, perubahan iklim dan berbagai masalah lain. (Subagyo, 2010).

Saat ini Indonesia tercatat sebagai importir beras terbesar di dunia. Jika kita tidak menemukan cara untuk meningkatkan produksi pangan, maka Indonesia sebagai bangsa yang merdeka tidak memiliki kedaulatan untuk menyediakan pangan secara mandiri bagi warganya, karena kebutuhan pokok beras sangat tergantung kepada bangsa lain. Eksploitasi negara maju akan semakin nyata meruntuhkan kedaulatan bangsa Indonesia, karena keunggulan sumber daya pertanian kita tak cukup ampuh untuk menjadikan negeri ini berdaulat di bidang pangan. (Posman, 2011)

Keberlanjutan pertanian dalam menyediakan pangan sangat tergantung pada SDM pertanian. Namun mayoritas pendidikan SDM pertanian Indonesia masih rendah, banyak petani yang berusia lanjut dan rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Salah satu kebijakan dalam meningkatkan produksi pertanian adalah pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Pengembangan SDM penting karena SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan pelaku langsung dari pembangunan pertanian. Tujuan dari kajian adalah: (a) mengetahui kondisi kedaulatan pangan di Indonesia (b) mengetahui kondisi SDM pertanian saat ini, dan (c) mengelola SDM pertanian untuk menunjang Kedaulatan pangan

METODE KAJIAN

Metode kajian terhadap pengelolaan SDM pertanian untuk menunjang kedaulatan pangan menggunakan penelusuran pustaka (studi pustaka). Penelusuran sumber pustaka memanfaatkan hasil penelian terdahulu baik dari publikasi *on line* maupun referensi dalam bentuk buku, berkala maupun sumber ilmiah lainnya. Kajian terhadap hasil penelian diharapkan dapat memberikan informasi terkini.

KONDISI KEDAULATAN PANGAN INDONESIA

Sejak World Food Summit pertama pada tahun 1996 di Roma para petani telah menyampaikan bahwa hanya dengan diwujudkannya kedaulatan pangan lah dunia mampu untuk menghapuskan kelaparan sekaligus menghapuskan kemiskinan di pedesaan. Konsep “kedaulatan pangan”, pertama kali diperkenalkan oleh organisasi petani internasional bernama La Via Campesina pada World Food Summit (WFS) tersebut, pada Nopember 1996 di Roma, Italia. konsep kedaulatan pangan banyak diadopsi berbagai elemen gerakan sosial di seluruh dunia. Mereka mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi, berdasarkan produksi yang berskala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan mereka sendiri dan keberagaman kaum tani. (Galih, 2012).

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk menentukan kebijakannya sendiri dengan memprioritaskan produk pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, serta melarang praktik perdagangan pangan dengan cara *dumping* (Prmono dalam Galih, 2012). Dalam paradigma ini, tiap negara berhak menentukan dan mengendalikan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan sendiri, sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya lokal, serta tidak ada campur tangan negara lain. (Sulistiyowati 2003 dalam Galih, 2012).

Pendapat lain mengatakan bahwa kedaulatan pangan lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenagakerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan ekologis, sosial, ekonomi dan

budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka. Ini menyangkut hak yang sebenar-benarnya terhadap pangan dan produksi pangan, sehingga orang mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan cocok dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya. (Galih, 2012).

Menurut Administratur SPI (2008) Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah. Dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan tersebut, pemerintah haruslah melaksanakan kebijakan – kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi pertanian keluarga, menggantikan peran industri yang berorientasi pertanian eksport.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai importir beras terbesar di dunia. Jika kita tidak menemukan cara untuk meningkatkan produksi pangan, maka Indonesia sebagai bangsa yang merdeka tidak memiliki kedaulatan untuk menyediakan pangan secara mandiri bagi warganya, karena kebutuhan pokok beras sangat tergantung kepada bangsa lain. Eksploitasi negara maju akan semakin nyata meruntuhkan kedaulatan bangsa Indonesia, karena keunggulan sumber daya pertanian kita tak cukup ampuh untuk menjadikan negeri ini berdaulat di bidang pangan. (Posman, 2011)

Untuk menghadapi tantangan tersebut sesungguhnya pemerintah telah memiliki posisi yang jelas seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyediaan pangan dilakukan dengan

mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Namun berbagai fakta tentang besarnya impor input pertanian dan produk pangan serta terbatasnya ketersediaan sumber daya produksi pertanian pangan mencerminkan bahwa kebijakan itu belum dijalankan dengan baik. (Ayip, 2011). Mengacu pada_RAPBN 2013 Indonesia akan sulit mewujudkan kedaulatan pangan, hal ini dapat dilihat dari subsidi benih tahun 2013 senilai 76.900 ton (Rp 137,9 miliar), turun jauh dari tahun 2012 sebesar 186.000 ton (Rp. 1,89 triliun). Sementara untuk pupuk, menjadi 7,3 juta ton (Rp. 15,9 triliun), dari sebelumnya Rp. 675 milyar. Ditingkat produksi, benih dan pupuk saling melengkapi, tidak menggantikan.(Anonim, 2012).

KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN INDONESIA

Pada kurun waktu 2004 sampai dengan 2009 lebih dari 40 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian , seperti terlihat pada table 1 berikut.

Tabel 1. Penduduk Indonesia Usia > 15 tahun Yang Bekerja di Sektor Pertanian

Tahun	Jumlah penduduk yang bekerja di sector pertanian (jiwa)	Total jumlah penduduk (jiwa)	Persen (%)
2004	40.608.019	93.722.036	43,33
2005	41.309.776	93.958.387	43,97
2006	40.136.242	95.456.935	42,05
2007	41.206.474	99.930.217	41,24
2008	41.331.706	102.552.750	40,30
2009	43.029.493	104.485.444	41,18

Sumber: blog.ub.ac.id/andimudj/files/2012/02/MA-MSDM.ppt

Jumlah tenaga kerja pertanian (pelaku utama/petani) mencapai 39.035.692 orang (37,22 %) dari seluruh tenaga kerja nasional yang berjumlah 104.870.663 orang (BPS 2010). Bagian terbesar dari tenaga kerja pertanian berada di sub sektor tanaman pangan yang mencapai 19.421.893 orang (49,75 %), diikuti berturut-turut oleh tenaga kerja di sub sektor perkebunan sebanyak 12.108.179 orang (31,02 %), sub sektor peternakan sebanyak 4.135.545 orang (10,50 %), sub sektor hortikultura 3.001.077 orang (7,69 %), sub sektor jasa pertanian 197.978 orang (0,51 %), dan sub sektor campuran 171.020 orang (0,44 %).

Dewasa ini mutu SDM pertanian Indonesia masih memiliki keterbatasan yang nyata. Menurut

Nuhung (2006), persentase penduduk setengah pengangguran 70,2 % berada pada sektor pertanian dan 29,8 % berada di sektor non pertanian. Potret SDM yang 70,2 % kalau dilihat dari tingkat pendidikan formal maka 35,5 % berpendidikan SD kebawah, 23,5 % berpendidikan SLTP, 35,5 % berpendidikan SLTA dan 5,7 % berpendidikan perguruan tinggi. Berdasarkan curahan jam kerja yang dihitung berdasarkan lamanya bekerja per minggu, ternyata tenaga kerja pertanian baik secara komutatif maupun pada masing-masing subsektor, sebanyak 59 % bekerja kurang dari 35 jam per minggu (katagori *disguised unemployment*)

Sementara berdasarkan data statistik Tahun 1999 dan 2002 produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menduduki urutan terakhir (sebesar 6.923) dibanding produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha yang lain. Berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan petani (produktivitas tenaga kerja yang diukur sebagai nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian), data menunjukkan bahwa rasio pendapatan tenaga kerja sektor pertanian/non pertanian sangat rendah yakni hanya 0,23. Lebih lanjut Intan (1997), mengungkapkan bahwa mutu sumberdaya manusia agribisnis Indonesia dalam era otonomi daerah ini masih terdapat kendala yang mendalam dalam hal sikap mental yang menghambat, terutama dalam hal sikap malas/enggan/lamban, masa bodoh dan tidak peduli, suka menunda, kerja asal jadi, iri dan dengki.

PENGELOLAAN SDM PERTANIAN UNTUK MENUNJANG KEDAULATAN PANGAN

Pembinaan sumberdaya manusia pada sektor pertanian saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya keteringgalan Indonesia dalam hal mutu sumberdaya manusia (SDM). Tuntutan pembinaan mutu SDM tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global, di mana dalam kondisi tersebut akan mendorong semakin tingginya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian antar negara.

Peter Thigpen (1991) dalam Pfeffer (1996) pembinaan mutu SDM di era otonomi daerah, di mana pemerintah otonomi daerah mempunyai proporsi yang besar dalam mewujudkan bagus atau tidaknya SDM pada sektor agribisnis. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan; a) Pembinaan unsur kognitif yang meliputi pengetahuan dasar tentang agribisnis, teknologi agribisnis, dan manajerial dibidang agribisnis serta bidang pendukungnya seperti keuangan, pemasaran operasi produksi dan lain-lain. Pembinaan unsur kognitif ini mencakup upaya-upaya peningkatan

pengetahuan, melatih daya pikir, kemampuan analisis, mempertajam intelegensi dan kecerdasan serta peningkatan pengetahuan manajerial dan wawasan teknologi bidang agribisnis; b) Pembinaan unsur psikomotorik mencakup upaya-upaya untuk membina dan meningkatkan keahlian dan keterampilan spesifik dari penjabaran bidang-bidang kognitif seperti keterampilan bidang manajerial, keterampilan bidang produksi, keterampilan bidang teknologi; c) Pembinaan unsur afeksi, yakni sikap mental, moral, dan etika. Sesungguhnya pembinaan unsur ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja SDM agribisnis. Sikap mental, moral dan etika tersebut mampu mendorong terciptanya suasana kerja yang harmonis, ketenagan kerja serta memberikan dukungan moral terhadap peningkatan produktivitas organisasi

Pembinaan unsur intuisi, merupakan kombinasi antara unsur kognisi, psikomotor, serta afeksi yang dimilikinya. Intuisi merupakan suatu kemampuan mutu SDM yang bersumber dari keyakinan diri dan dapat mempengaruhi tindakan-tindakan manusia terutama tindakan arif dan bijak dalam melihat peluang dan kesempatan bisnis.

Dengan rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan pertanian yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penyuluhan dan pelatihan, pendidikan formal bagi putra/putri petani. Petani sebagai salah satu pelaku utama pembangunan pertanian memerlukan kemampuan yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun ketrampilan untuk mengantisipasi berbagai perubahan strategis baik ditingkat lapang, nasional, maupun internasional. Petani memerlukan penyesuaian substansi materi penyuluhan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, *global warning*, persaingan globalisasi (perdagangan bebas) atau perubahan lingkungan, baik lingkungan alam, social maupun budaya.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh petani dan pelaku usaha diindikasikan dengan: (1) adanya kelembagaan tani (poktan/gapoktan) yang mandiri, kuat dan berbadan hukum (koperasi, LKM); (2) jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan data dan informasi dan (4) jumlah petani yang bergabung dalam jejaring kerja dan kerjasama atau kemitraan usaha.

Kondisi dimana pelaku utama pembangunan pertanian telah berusia lanjut, perlu adanya kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian

dan sekaligus mencegah *second lost generation*. Menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperkenalkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tani baik laki-laki maupun perempuan, khususnya golongan muda dalam melakukan produksi di tingkat *on-farm* dan *off-farm*. Oleh karena itu lembaga penelitian dan pengembangan harus dapat menghasilkan teknologi yang dapat menarik minat kaum muda, seperti mekanisasi pertanian, dan teknologi pengolahan hasil pertanian. Baik lembaga penelitian maupun lembaga penyuluhan harus selalu dapat berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian mengingat lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan di Indonesia tidak berada dalam satu atap. Untuk menarik lebih banyak generasi muda berkecimpung di bidang pertanian, perlu dibuka akses yang lebih besar pada pemuda, terutama yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA serta PT untuk membuka usaha berbasis pertanian. Disamping hal itu juga dengan menembangkan berbagai program pelatihan kewirausahaan sektor pertanian.

Mengingat ciri dari agribisnis ialah adanya produktivitas dan efisiensi yang tinggi, maka usaha tani yang layak diterapkan menggunakan pola sahamparan. Beberapa petani bergabung membentuk kelompok tani, menyatukan lahannya untuk mengusahakan komoditi tertentu yang telah diketahui memiliki propek pasar yang cerah. Dengan demikian petani harus siap baik secara fisik atau mental. Untuk itu diperlukan bimbingan dan penyuluhan yang intensif. Dengan kesiapan pelaku utama pertanian (petani) baik dari unsur kognitif, psikomotorik, afeksi dan intuisi, diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian yang berimplikasi pada terwujudnya kedaulatan pangan

KESIMPULAN

1. Indonesia perlu meningkatkan ketersediaan pangan
2. SDM pertanian Indonesia saat ini memiliki kualifikasi daya saing yang rendah dan
3. Diperlukan pengelolaan SDM pertanian dengan fokus pada empat unsur utama yakni kognisi, psikomotor, afeksi, dan intuisi. Dengan pengelolaan SDM pertanian pada empat unsur tersebut, diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian yang berimplikasi pada terwujudnya kedaulatan pangan

PUSTAKA

- Abdullah, Ayip. 2011. *Sistem Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal-bagian 2*. <http://kedaulatanpangan.net/2011/12/sistem-pangan-berbasis-sumberdaya-lokal-bagian-2/>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2012.
- Administrator SPI. 2008. *Pandangan dan Sikap SPI tentang Kedaulatan Pangan*. <http://www.spi.or.id/?p=329>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2012.
- Andreanto, Galih. 2012. *Mengembalikan Visi Kedaulatan Pangan*. <http://politik.kompasiana.com/2012/09/23/mengembalikan-visi-kedaulatan-pangan/>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2012.
- _____. 2012. *Mengembalikan Visi Kedaulatan Pangan (2)*. <http://politik.kompasiana.com/2012/09/23/mengembalikan-visi-kedaulatan-pangan-2/>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2012.
- Anonim, 2012. *RAPBN 2013 Sulit Wujudkan Kedaulatan Pangan*. <http://bisnis.keuangan.kompas.com/read/2012/09/06/09390331/RAPBN.2013.Sulit.Wujudkan.Kedaulatan.Pangan>
- Anonim, blog.ub.ac.id/andimudj/files/2012/02/MA-MSDM.ppt
- Intan, A.H. 1997. Pengembangan Mutu SDM Agribisnis Menghadapi Tahun 2020. dalam *AgriMedia I* (3).
- Kementrian Pertanian, 2013. *Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan: Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan*. Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementrian Pertanian
- Nuhung, I.A. 2006. *Bedah Terapi Pertanian Nasional – Peran Strategis dan Revitalisasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Pfeffer, J. 1996. *Competitive Advantage Through People*. Cambridge: Harvard Business School Press.
- Sibuea, Posman. 2011. *Membangun Kedaulatan Pangan*, http://www.analisa.daily.com/news/read/2011/10/27/18972/membangun_kedaulatan_pangan/#.UICEEdDSZ4. Di unduh tanggal 16 Oktober 2012.